

Analisis Hambatan dan Efektivitas Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Penegakan Hukum

Alvaro Emira Aditya Putra¹ Akram Imam Syah² Dandi Rafi Athallah³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Masyarakat, Indonesia^{1,2,3}

Email : varoemira04@gmail.com¹ akramimamsyah@gmail.com² drafiathallah@gmail.com³

Abstract

The presence of foreign nationals in Indonesia continues to increase along with the dynamics of globalization, which consequently raises various legal issues related to immigration control and law enforcement. One of the strategic instruments utilized by immigration authorities is administrative immigration measures, which function as a non-judicial mechanism to address violations committed by foreign nationals. This study aims to analyze the obstacles and effectiveness of the implementation of administrative immigration measures as an instrument of law enforcement against foreign nationals in Indonesia. This research employs a juridical-empirical method with a statutory and case approach, referring to Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian and its implementing regulations. The findings indicate that although administrative measures such as deportation, deterrence, and restriction of stay permits are relatively effective in handling immigration violations, their implementation still encounters several obstacles, including limited human resources, weak inter-agency coordination, and administrative inefficiencies. In addition, inconsistencies in the application of policies may affect legal certainty and fairness. Therefore, strengthening institutional capacity, improving coordination among stakeholders, and optimizing regulatory frameworks are necessary to enhance the effectiveness of administrative immigration measures in supporting law enforcement.

Keywords: Administrative Immigration Measures, Law Enforcement, Foreign Nationals, Immigration Law, Effectiveness

Abstrak

Keberadaan warga negara asing di Indonesia terus meningkat seiring dengan dinamika globalisasi, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan hukum terkait pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Salah satu instrumen strategis yang digunakan oleh otoritas imigrasi adalah tindakan administratif keimigrasian, yang berfungsi sebagai mekanisme non-yudisial untuk menangani pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian sebagai instrumen penegakan hukum terhadap warga negara asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan administratif seperti deportasi, penangkalan, dan pembatasan izin tinggal relatif efektif dalam menangani pelanggaran keimigrasian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta inefisiensi administratif. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan juga berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan rasa keadilan. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi kerangka regulasi guna meningkatkan efektivitas tindakan administratif keimigrasian dalam mendukung penegakan hukum.

Kata Kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian, Penegakan Hukum, Warga Negara Asing, Hukum Keimigrasian, Efektivitas



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Mobilitas warga negara asing ke Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sebagai konsekuensi dari perkembangan globalisasi yang mendorong interaksi antarnegara dalam berbagai sektor kehidupan. Arus perpindahan manusia yang semakin terbuka menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang strategis bagi kegiatan ekonomi, investasi, pariwisata, serta hubungan internasional lainnya. Kondisi ini memberikan dampak terhadap meningkatnya kompleksitas pengawasan keimigrasian yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga ketertiban dan kedaulatan nasional. Peningkatan mobilitas tersebut tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum keimigrasian yang memerlukan penanganan secara serius dan sistematis. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan lalu lintas orang asing di wilayah Indonesia (Widiyanti, 2022).

Keberadaan warga negara asing di Indonesia berkaitan erat dengan fungsi keimigrasian sebagai salah satu instrumen negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan nasional. Fungsi keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan publik, tetapi juga mencakup aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya. Pengawasan terhadap warga negara asing memiliki keterkaitan langsung dengan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ancaman tersebut mencakup pelanggaran administratif hingga kejahatan transnasional yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan keimigrasian (Fakhrudin, Alfero Deputra, & Antomarta, 2022). Pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing di Indonesia menunjukkan pola yang semakin beragam, terutama dalam bentuk overstay dan penyalahgunaan izin tinggal yang terjadi di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran secara berulang. Penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dilakukan melalui mekanisme administratif maupun yustisial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan administratif keimigrasian menjadi instrumen yang dominan digunakan karena memiliki karakteristik cepat dan efisien dalam menangani pelanggaran. Pelaksanaan tindakan administratif tersebut merupakan bagian dari kewenangan pejabat imigrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Widiyanti, 2022).

Efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Pengawasan terhadap warga negara asing dilakukan melalui mekanisme administratif dan lapangan yang melibatkan berbagai pihak dalam sistem keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada keterbatasan jangkauan pengawasan di wilayah kerja yang luas. Kinerja Tim Pengawasan Orang Asing menunjukkan adanya tantangan dalam mengawasi seluruh aktivitas warga negara asing secara menyeluruh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan berkaitan erat dengan kesiapan sumber daya dan sistem yang digunakan (Khairunnisa, 2024). Hambatan dalam penerapan tindakan administratif keimigrasian berkaitan dengan aspek kelembagaan yang belum berjalan secara optimal. Koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan warga negara asing masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan jumlah petugas imigrasi serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait keberadaan warga negara asing juga masih

terbatas. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian memerlukan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan (Ninage & Diamantina, 2022).

Perkembangan teknologi informasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keimigrasian. Pemanfaatan sistem digital dalam pengawasan orang asing dapat membantu aparat dalam memperoleh data secara cepat dan akurat. Pengawasan berbasis teknologi dapat meningkatkan transparansi serta meminimalisir potensi kesalahan dalam pelaksanaan tindakan administratif. Penggunaan teknologi tersebut masih memerlukan penguatan dari sisi sistem dan integrasi data antarinstansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pengawasan keimigrasian menjadi kebutuhan dalam mendukung penegakan hukum yang lebih efektif (Fakhruddin et al., 2022). Fenomena penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing berkembang dalam berbagai bentuk yang semakin kompleks, salah satunya praktik investor fiktif yang memanfaatkan celah regulasi keimigrasian. Praktik ini menunjukkan bahwa pelanggaran keimigrasian memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi dan keamanan nasional. Kelemahan dalam sistem pengawasan serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan warga negara asing tidak merugikan kepentingan nasional (Wijaya, Tambunan, & Purwanti, 2025).

Analisis terhadap hambatan dan efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian memiliki peran penting dalam menilai kinerja sistem penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Kajian ini memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Evaluasi terhadap efektivitas tindakan administratif diperlukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen ini mampu memberikan efek jera bagi pelanggar. Analisis tersebut juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem keimigrasian serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang berlaku terkait penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing (Pratama, Muhksin, & Suhartini, 2025). Analisis dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji hambatan dan efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian (Pratama, Asa, Irwin, & Ferdaus, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindakan administratif keimigrasian merupakan instrumen hukum yang memiliki karakteristik khusus karena dapat diterapkan secara langsung oleh pejabat imigrasi tanpa melalui proses peradilan. Instrumen ini menjadi bagian dari kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang asing serta menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Pengaturan mengenai tindakan administratif keimigrasian telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang memberikan dasar hukum bagi pejabat imigrasi

untuk mengambil tindakan terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan keimigrasian. Bentuk tindakan administratif tersebut meliputi deportasi, penangkalan, pembatasan izin tinggal, serta kewajiban untuk berada di tempat tertentu (Alfajri, Pratama, Said, & Atiah, 2026). Karakter non-yudisial yang melekat pada tindakan ini memungkinkan proses penegakan hukum berjalan lebih cepat dibandingkan mekanisme peradilan. Efektivitas tindakan administratif keimigrasian dapat dilihat dari kemampuannya dalam merespons pelanggaran keimigrasian secara cepat dan tepat. Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah *overstay* dan penyalahgunaan izin tinggal, yang memerlukan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap ketertiban umum. Tindakan deportasi menjadi salah satu instrumen yang paling dominan digunakan karena memiliki efek langsung terhadap pelanggar dengan cara mengeluarkan yang bersangkutan dari wilayah Indonesia. Penangkalan juga berperan penting dalam mencegah masuknya kembali warga negara asing yang sebelumnya telah melakukan pelanggaran. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tindakan administratif keimigrasian memiliki fungsi preventif sekaligus represif dalam sistem penegakan hukum (Pratama, 2025).

Efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Regulasi yang ada telah memberikan kerangka yang cukup jelas mengenai jenis pelanggaran dan bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan. Aparat imigrasi memiliki kewenangan diskresi dalam menentukan tindakan yang paling tepat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Diskresi ini memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, tetapi juga menuntut profesionalisme dan integritas aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Kejelasan norma dan konsistensi penerapan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing maupun aparat penegak hukum. Hambatan dalam penerapan tindakan administratif keimigrasian masih menjadi isu yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama, terutama dalam hal jumlah dan kompetensi petugas pengawasan orang asing. Beban kerja yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan jumlah personel yang memadai, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing.

Aspek koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Pengawasan terhadap warga negara asing tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi imigrasi, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi yang belum optimal dapat menghambat pertukaran informasi dan memperlambat proses penanganan pelanggaran. Integrasi data antarinstansi menjadi kebutuhan yang penting agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan keimigrasian masih menghadapi berbagai tantangan. Sistem informasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh dapat menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh data yang akurat mengenai keberadaan dan aktivitas warga negara asing. Penguatan sistem digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penegakan hukum. Penggunaan teknologi yang optimal juga dapat membantu dalam meminimalkan potensi kesalahan administratif serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas tindakan administratif keimigrasian adalah tingkat kepatuhan warga negara asing terhadap peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan keimigrasian serta pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan keimigrasian dapat menyebabkan

pelanggaran yang bersifat administratif terus terjadi. Upaya preventif melalui edukasi dan penyebaran informasi menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Efektivitas tindakan administratif keimigrasian juga berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan keadilan. Penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Ketidakkonsistenan dalam penerapan kebijakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan persepsi diskriminasi. Profesionalisme aparat dan pengawasan internal menjadi faktor penting dalam menjaga integritas penegakan hukum keimigrasian. Analisis terhadap hambatan dan efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki peran yang strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemampuan untuk bertindak cepat dan fleksibel menjadi keunggulan utama dibandingkan mekanisme yudisial. Penguatan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing.

KESIMPULAN

Tindakan administratif keimigrasian merupakan instrumen penegakan hukum yang memiliki peran strategis dalam mengendalikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Indonesia. Keberadaan instrumen ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan secara cepat dan efektif terhadap pelanggaran keimigrasian tanpa melalui proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penerapan tindakan seperti deportasi, penangkalan, dan pembatasan izin tinggal terbukti mampu menjadi mekanisme yang responsif dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara. Efektivitas penerapan tindakan administratif keimigrasian dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Hambatan yang muncul dalam praktik menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah memadai, implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Tingkat kepatuhan warga negara asing serta konsistensi aparat dalam menerapkan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum keimigrasian. Penerapan tindakan administratif keimigrasian menunjukkan bahwa instrumen ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas dibandingkan mekanisme yudisial. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, serta optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian. Hal tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika pergerakan warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, D. R., Pratama, I. A., Said, S., & Atiah, I. N. (2026). Revisiting Food Purchasing Intention Determinants: Strategic Roles of Social Media Promotion and Halal Labelling. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 07(01), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ajim.v7i1.87284>
- Fakhrudin, G. P., Alfero Deputra, A., & Antomarta, A. (2022). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Dalam Menghadapi Potensi Ancaman Keamanan Nasional Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 67–77.

- Khairunnisa, M. N. (2024). Efektivitas Pengawasan Terhadap Warga Negara Asing Oleh Tim Pengawasan Orang Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212>
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Pratama, I. A. (2025). Inovasi Pemanfaatan Kain Perca Ulos Sebagai Pelestarian Budaya Batak Dalam Menghadapi Bonus Demografi 2045 (Studi Kasus Kampung Ulos Hutaraja, Kabupaten Samosir). *Bajang Journal*, 5(1), 77–90.
- Pratama, I. A., Asa, S. A., Irwin, M., & Ferdaus, N. N. (2025). Analisis Pengaruh TPT dan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3859–3866.
- Pratama, I. A., Muhksin, M., & Suhartini, N. (2025). Mengurai Kontribusi Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi Sebagai Mediator. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2), 1505–1540. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.30651/jms.v10i2.26266>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Widiyanti, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wijaya, M. F., Tambunan, A., & Purwanti, M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Investor Fiktif Warga Negara Asing: Analisis Yuridis dan Implikasi terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3128–3135. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1603>